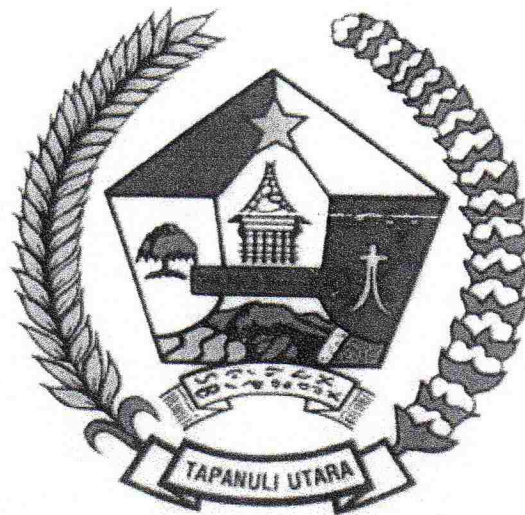


**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA**



**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan KaruniaNya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat menyelesaikan penyusunan/perencanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 ini kami susun, semoga dapat menjadi acuan dan sebagai peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Tarutung, Oktober 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



RUDI SITORUS S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197204291992031003,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dan Capaian Renstra OPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah.....	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	24
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP	30
BAB V PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) berupaya untuk terus melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan terciptanya *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2023, yang memuat program dan kegiatan pembangunan didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.

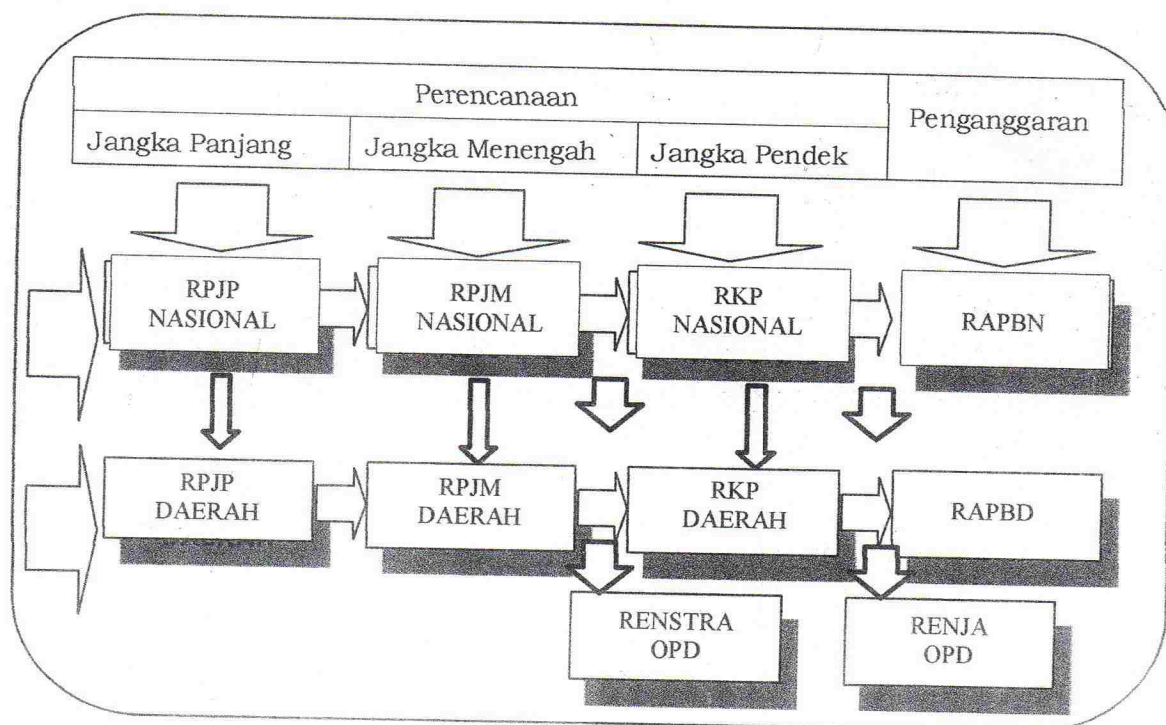
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh OPD diantaranya :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara, berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut di atas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra OPD.

Ruang lingkup Renja adalah pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara dalam 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini :



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 berdasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 19 Desember 2022;
- 13) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 19 Desember 2022.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 15) Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan Rencana Perangkat Daerah Tersebut adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bupati Tapanuli Utara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan.
- 2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.1 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dan Capaian Renstra OPD.

Rencana Kerja Perubahan OPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan Anggaran. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 tertuang dalam APDB-P Tahun 2023 dan Perubahan APBD Tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp. 10,891,754,552,- (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua) dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.823.542.946,- (Enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam).

Namun akibat Adanya perubahan perubahan di Daerah yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyusun APDB-P Tahun 2023 dan Perubahan APBD Tahun 2023, dimana hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan Dokumen penganggaran Daerah.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Tapanuli Utara

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Program Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	05	01	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	05	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja Perubahan, Lakip, Lapkeu	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	60%
1	05	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	60 Dokumen	60%
1	05	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
1	05	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
1	05	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	31 Orang	31 Orang	100%	28 Orang	90 Orang	290%
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	500 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	100 Dokumen	300 Dokumen	60%
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	60%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	24 Paket	60%
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	125 Paket	25 Paket	25 Paket	100%	25 Paket	75 Paket	60%
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	65 Paket	13 Paket	13 Paket	100%	13 Paket	39 Paket	60%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	500 Paket	100 Paket	100 Paket	100%	100 Paket	300 Paket	60%

1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	100 Laporan	300 Laporan	60%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	35 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tugas-tugas Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	665 Lembar	133 Lembar	133 Lembar	133 Lembar	100%	133 Lembar	399 Lembar	60%
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1115 Laporan	223 Laporan	223 Laporan	223 Laporan	100%	223 Laporan	699 Laporan	62%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	56 Unit	60%
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	24 Unit	60%
1	05	02	2.01		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2000 Kasus	400 Kasus	400 Kasus	100%	1200 Kasus	60%
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1000 Kasus	200 Kasus	200 Kasus	100%	600 Kasus	60%
1	05	02	2.01	03		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat Ditangani sesuai SOP	1250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	100%	750 Kasus	60%
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terwujudnya Tugas Pemadam Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tugas Pemadaman Kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%

1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	500 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100 Kasus	100%	100 Kasus	300 Kasus	60%
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	11 Unit	14 Unit	93%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan IKK Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra.

SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2023	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13
1	Persentase pengaduan pelanggaran Perda/Perbup yang diselesaikan			96	94	100	100	100	96	99	100	100	100	
2	Persentase keterlibatan/kerjasama antar lembaga dalam memelihara Ketertarikan dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran			30	20	15	15	15	30	25	15	15	15	Capaian rendah menunjukkan kinerja yang baik
4	Nilai Hasil Evaluasi Akip			75	80	85	90	90	53.49	60.20	90	90	90	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 5) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas menegakkan Perda/Perkada dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya, pada Pasa 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 disebutkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

Jika kita melihat pada tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maka kita akan mengetahui betapa berat tugas dan tanggung jawab ini apabila tidak didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Dalam melaksanakan tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara sudah pasti menghadapi berbagai kendala baik bersifat internal maupun eksternal.

Adapun permasalahan dan isu-isu penting yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah, sebagai berikut:

- a. SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara belum berimbang, karena minimnya pelatihan teknis dan non teknis guna mewujudkan SDM aparatur yang handal, profesional dan menguasai teknologi informasi.

- b. Adanya opini masyarakat yang hanya melihat Satuan Polisi Pamong Praja dari sisi negatifnya saja dan sering di anggap musuh masyarakat
- c. asih kurangnya personil dan peralatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Masih kurangnya Anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Masih kurangnya tingkat kesadaran warga masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan Perundang – Undangan yang berlaku.
- f. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait khususnya Dinas/Badan yang mempunyai Perda yang ada kaitannya dengan sanksi dan denda

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

review rencanaap rancangan awal rnkpd tapanuli utara 2023											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Tertlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	Rp 7,777,852,763.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Tertlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	Rp 7,330,447,163.00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Tertlaksananya Penyusunan Renstra, Renja Perubahan, Lakip, Lapkeu	5 Dokumen	Rp 81,999,700.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Tertlaksananya Penyusunan Renstra, Renja Perubahan, Lakip, Lapkeu	5 Dokumen	Rp 81,999,700.00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	Rp 4,999,900.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	Rp 4,999,900.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapanuli Utara	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP	2 Dokumen	Rp 4,999,900.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tapanuli Utara	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP	2 Dokumen	Rp 4,999,900.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 4,999,900.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp 4,999,900.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp 62,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp 62,000,000.00	

8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dengan Baik	12 Bulan	Rp 2,451,365,885.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dengan Baik	12 Bulan	Rp 2,451,365,885.00
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	Rp 2,396,126,685.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	Rp 2,396,126,685.00
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	100 Dokumen	Rp 50,239,200.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	100 Dokumen	Rp 50,239,200.00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 5,000,000.00
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	Rp 399,932,200.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	-
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Rp 399,932,200.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Baik	12 Bulan	Rp 211,279,100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Baik	12 Bulan	Rp 211,279,100.00
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 7,999,600.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 7,999,600.00
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Rp 24,098,200.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Rp 24,098,200.00

17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 Paket	Rp 6,171,300.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 Paket	Rp 6,171,300.00
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	Rp 3,400,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tapanuli Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	Rp 3,400,000.00
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp 169,610,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Rp 169,610,000.00
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp 94,210,100.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp 46,736,700.00
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapanuli Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	94,210,100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tapanuli Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	Rp 46,736,700.00
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Tugas-tugas Kantor	12 Bulan	Rp 4,232,895,728.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Tugas-tugas Kantor	12 Bulan	Rp 4,232,895,728.00
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Surat Menyurat	133 Lembar	Rp 1,330,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Surat Menyurat	133 Lembar	Rp 1,330,000.00
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 26,998,900.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 26,998,900.00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	223 Laporan	Rp 4,204,566,828.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	223 Laporan	Rp 4,204,566,828.00
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Rp 306,170,050.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Rp 306,170,050.00

27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapanuli Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Rp 298,797,250.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tapanuli Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Rp 298,797,250.00
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Rp 7,372,800.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tapanuli Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Rp 7,372,800.00
29	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp 1,618,428,150.00	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp 1,618,428,150.00
30	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp 1,265,281,350.00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	Rp 1,265,281,350.00
31	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Tapanuli Utara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	400 Kasus	Rp 1,265,281,350.00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Tapanuli Utara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	400 Kasus	Rp 1,265,281,350.00
32	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	12 Bulan	Rp 353,146,800.00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	12 Bulan	Rp 353,146,800.00
33	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Pelaksanaan	200 Kasus	Rp 214,199,900.00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	200 Kasus	Rp 214,199,900.00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Tapanuli Utara terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2017 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, sasaran pembangunan nasional tahun 2020 memiliki 5 prioritas nasional di antaranya pada prioritas nasional poin 5 yaitu, “kesuksesan pemilu dan keamanan cyber ” yang keterkaitan terhadap RPJMD yaitu, penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang merupakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari visi misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Adapun visi Kabupaten Tapanuli Utara 5 (Lima) tahun ke depan yaitu “Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan wisata”. Berdasarkan uraian di atas, maka saat ini ada 1 (satu) Misi yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah Misi Ke-8 (Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e- government), sasaran Ke-1 yaitu : "Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat".

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan penegakan Perda/Perbup
2. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan lembaga lainnya
3. Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan kebakaran
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah yang berkaitan dengan meningkatkan keamanan wilayah. Disamping program prioritas tersebut diatas diperlukan program- program penunjang yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD serta kegiatan yang bersifat sektoral dan rintisan.

Adapun Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Tapanuli Utara

Satuan Polisi Pamong Praja			Rencana Tahun 2023		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023						
1	05	01	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	(3) Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(4) Tapanuli Utara	(5) 12 Bulan	(6) Rp 7,777,852,763.00	(7) Dau	(8)	(9) 12 Bulan	(10) Rp 7,330,447,163.00
1	05	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja Perubahan, Lakip, Lapkeu	Tapanuli Utara	5 Dokumen	Rp 81,999,700.00	Dau		5 Dokumen	Rp 81,999,700.00
1	05	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	20 Dokumen	Rp 4,999,900.00	Dau		20 Dokumen	Rp 4,999,900.00
1	05	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA, RKAP	Tapanuli Utara	2 Dokumen	Rp 4,999,900.00	Dau		2 Dokumen	Rp 4,999,900.00
1	05	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tapanuli Utara	2 Dokumen	Rp 4,999,900.00	Dau		2 Dokumen	Rp 4,999,900.00
1	05	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tapanuli Utara	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	Dau		1 Laporan	Rp 5,000,000.00
1	05	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	12 Laporan	Rp 62,000,000.00	Dau		12 Laporan	Rp 62,000,000.00
1	05	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dengan Baik	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 2,451,365,885.00	Dau		12 Bulan	Rp 2,451,365,885.00
1	05	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tapanuli Utara	30 Orang/Bula n	Rp 2,396,126,685.00	Dau		30 Orang/Bula n	Rp 2,396,126,685.00
1	05	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Tapanuli Utara	100 Dokumen	Rp 50,239,200.00	Dau		100 Dokumen	Rp 50,239,200.00

1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tapanuli Utara	1 Laporan	Rp 5,000,000.00	Dau	1 Laporan	Rp 5,000,000.00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 399,932,200.00	Dau	12 Bulan	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tapanuli Utara	1 Paket	Rp 399,932,200.00	Dau		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Baik	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 211,279,100.00	Dau	12 Bulan	Rp 211,279,100.00
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tapanuli Utara	8 Paket	Rp 7,999,600.00	Dau	8 Paket	Rp 7,999,600.00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tapanuli Utara	25 Paket	Rp 24,098,200.00	Dau	25 Paket	Rp 24,098,200.00
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Tapanuli Utara	13 Paket	Rp 6,171,300.00	Dau	13 Paket	Rp 6,171,300.00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Tapanuli Utara	100 Paket	Rp 3,400,000.00	Dau	100 Paket	Rp 3,400,000.00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tapanuli Utara	100 Laporan	Rp 169,610,000.00	Dau	100 Laporan	Rp 169,610,000.00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 94,210,100.00	Dau	12 Bulan	Rp 46,736,700.00
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Tapanuli Utara	7 Unit	94,210,100	Dau	3 Unit	Rp 46,736,700.00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tugas-tugas Kantor	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 4,232,895,728.00	Dau	12 Bulan	Rp 4,232,895,728.00
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tapanuli Utara	133 Lembar	Rp 1,330,000.00	Dau	133 Lembar	Rp 1,330,000.00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tapanuli Utara	12 Laporan	Rp 26,998,900.00	Dau	12 Laporan	Rp 26,998,900.00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tapanuli Utara	223 Laporan	Rp 4,204,566,828.00	Dau	223 Laporan	Rp 4,204,566,828.00

1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 306,170,050.00	Dau	12 Bulan	Rp 306,170,050.00
1	05	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tapanuli Utara	22 Unit	Rp 298,797,250.00	Dau	22 Unit	Rp 298,797,250.00
1	05	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tapanuli Utara	8 Unit	Rp 7,372,800.00	Dau	8 Unit	Rp 7,372,800.00
1	05	02	2.01	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 1,618,428,150.00	Dau	12 Bulan	Rp 1,618,428,150.00
1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 1,265,281,350.00	Dau	12 Bulan	Rp 1,265,281,350.00
1	05	02	2.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Tapanuli Utara	400 Kasus	Rp 1,265,281,350.00	Dau	400 Kasus	Rp 1,265,281,350.00
1	05	02	2.02	Pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 353,146,800.00	Dau	12 Bulan	Rp 353,146,800.00
1	05	02	2.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tapanuli Utara	200 Kasus	Rp 214,199,900.00	Dau	200 Kasus	Rp 214,199,900.00
1	05	02	2.01		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat Ditangani sesuai SOP	Tapanuli Utara	250 Kasus	Rp 138,946,900.00	Dau	250 Kasus	Rp 138,946,900.00
1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terwujudnya Tugas Pemadam Kebakaran	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp 168,300,000.00	Dau	12 Bulan	Rp 168,300,000.00

1	05	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tugas Pemadaman Kebakaran	Tapanuli Utara	12 Bulan	Rp	168,300,000.00	Dau	12 Bulan	Rp	168,300,000.00	
1	05	04	2.01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tapanuli Utara	100 kasus	Rp	159,900,000.00	Dau	100 Kasus	Rp	159,900,000.00	
1	05	04	2.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Tapanuli Utara	1 Unit	Rp	8,400,000.00	Dau	1 Unit	Rp	8,400,000.00	
								Total	Rp	9,564,580,913.00	Total		Rp	9,117,175,313.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Satuan Kerja pelaksana program, Rencana Kerja ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari sisi pendanaan, sumber dana untuk membiayai anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 dan jika memungkinkan maka akan diupayakan sumber-sumber pendanaan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat. Adapun dana yang dibutuhkan Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka merealisasikan program/kegiatan tahun 2023 sebesar Rp. 10,891,754,552,- (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua), sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1

Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Beriambah/ (Berkurang)	T+1			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T (Sebelum)					T (Sesudah)									
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18 = (15+16+17+18)	20 = (19+18)	21			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.461.970.813	102.610.100	0	0	0	9.564.580.913	10.836.617.852	55.136.700	0	0	10.891.754.552	1.327.173.639			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.683.642.663	94.210.100	0	0	0	7.777.852.763	7.986.995.202	46.736.700	0	0	8.032.831.902	254.979.139			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81.999.700	0	0	0	0	81.999.700	81.999.700	0	0	0	81.999.700	0			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.999.900	0	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0			
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen EKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.999.900	0	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0			
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.999.900	0	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	0	4.999.900	0			
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0			
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		62.000.000	0	0	0	0	62.000.000	62.000.000	0	0	0	62.000.000	0			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.451.365.885	0	0	0	0	2.451.365.885	2.653.704.274	0	0	0	2.653.704.274	202.338.389			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2.396.126.685	0	0	0	0	2.396.126.685	2.598.465.074	0	0	0	2.598.465.074	202.338.389			
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50.239.200	0	0	0	0	50.239.200	50.239.200	0	0	0	50.239.200	0			
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0			
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			399.932.200	0	0	0	0	399.932.200	0	0	0	0	0	(399.932.200)			
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		399.932.200	0	0	0	0	399.932.200	0	0	0	0	0	0	(399.932.200)		
05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			211.279.100	0	0	0	0	211.279.100	271.304.100	0	0	0	271.304.100	60.025.000			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan sebagai implementasi tahun keempat dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dilakukan dengan berupaya mewujudkan konsistensi antara dokumen renja OPD disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran Renja dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara.

Sejumlah program kegiatan Polisi Pamong Praja serta indikator kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 melalui koordinasi/asistensi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai proses dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. RKAP yang telah disetujui oleh TAPD dan DPRD dalam pembahasan RAPBD akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penjabaran dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, Oktober 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TAPANULI UTARA



RUDI SITORUS S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197204291992031003,-